



Minta Pemkot Tata Aset

Pemandangan Umum Fraksi pada LKPJ 2018

PONTIANAK, TRIBUN - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin menilai beberapa catatan penting sepanjang berjalan anggaran tahun 2018 adalah terkait penataan aset Pemkot Pontianak, sehingga menurutnya perlu dirapikan karena meskipun Pemkot Pontianak didalam penilaian BPK mendapatkan WTP masih ada atensi yang perlu diperhatikan yakni soal pengelolaan aset.

Selain itu, perlu juga evaluasi sepanjang pengelolaan keuangan tahun 2018 lalu, apakah program tersebut langsung menyentuh kepentingan masyarakat secara luas.

"Hal-hal lain juga seperti-nya juga telah diaudit. Hal-nya bagaimana kita ingin melihat apakah apa yang dilakukan sepanjang tahun 2018 lalu sudah tepat guna, apakah program tersebut masih perlu dianggarkan untuk tahun 2020 mendatang," ujarnya sesaat setelah Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD Kota Pontianak, Senin (8/7).

Pada prinsipnya, Menurut Heri Mustamin pihaknya memberikan apresiasi terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban dan pengelolaan keuangan dari pemerintah Kota Pontianak. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan capaian dengan meraih WTP dari BPK.

"WTP itu tidak sembarangan, karena ada juga daerah yang belum bisa meraih WTP. Hal tersebut menandakan bahwa pemkot sangat konsisten dalam pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

Hanya mungkin, harapan besar bagi pemerintah kota Pontianak bersama Walikota dan Wakil Walikota Pontianak yang baru secara konsisten untuk mempertahankan capaian yang telah diraih selama kurun waktu delapan tahun berturut-turut.

"Bukan hanya sekadar WTP tetapi lebih dari dari-pada itu. Kalau ada istilah-nya WTP plus dan itu harus dikejar, karena kita sudah mencapai delapan tahun," ujarnya.

Agar tak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, Politisi Partai Golkar tersebut menilai bahwa peran dari pejabat inspektorat dapat menjadi garda pertama untuk memberikan pengawasan.

"Jika memang terdapat masalah mulai dari perencanaan hingga proses pelaksanaan dapat betul-betul diawasi. Sehingga terjadinya dugaan penyimpangan dan kesalahan dapat dihindari," ujarnya. "APBD Kita ini kan minim jangsan sampai APBD yang posturnya tidak begitu besar justru tidak tepat guna," ujar.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Pontianak dari

Fraksi PDI Perjuangan Emiliana TB menyampaikan sejumlah rekomendasi pada LKPJ Pemerintah Kota Pontianak tahun anggaran 2018 lalu.

Salah satu poin rekomendasi agar pemerintah kota Pontianak segera melakukan revisi atau menyusun peraturan tentang pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain sebagai bentuk pengamanan aset pemerintah kota Pontianak.

"Masalah penataan aset ini selalu kami sampaikan akan tetapi hasilnya dari tahun ke tahun selalu menyalakan permasalahan," ujarnya.

Terkait hal itu, Menurut Emiliana pemkot perlu membentuk tim agar masalah aset dapat segera dituntaskan dalam kurun waktu tahun 2019 ini.

Tak hanya itu, fraksi PDI Perjuangan juga memandang perlu untuk peningkatan potensi pendapatan asli daerah. Seperti penguasaan tarif harga yang wajar dalam kerjasama penggunaan tanah HPL dan lain sebagainya.

Fraksi PDI Perjuangan juga memandang masih ba-

nyak program yang belum tuntas seperti jalan paralel, penataan pinggir sungai ka-puas, penataan tiang listrik sebagai akibat pelebaran jalan, penanganan sampah, jalan lingkungan, drainase dan bantuan untuk para warga miskin.

"Hendaknya semua program tersebut dapat segera dilakukan evaluasi. Pada bantuan untuk warga miskin hendaknya dapat disalurkan dengan tepat sasaran," ujarnya.

Dari sektor pendidikan, Emiliana mengatakan bahwa hendaknya pemerintah kota Pontianak juga dapat memberikan kontribusi riil untuk peningkatan kualitas sekolah negeri dan swasta di Kota Pontianak.

"Alokasi anggaran pendidikan dalam postur APBD sudah cukup besar dan telah melebihi standar minimal dari yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Pemkot Pontianak juga perlu intensif berkomunikasi dengan pemprov hingga pemerintah pusat agar mendorong bantuan program maupun anggaran," pungkasnya. **(dan)**



WTP itu tidak sembarangan, karena ada juga daerah yang belum bisa meraih WTP. Hal tersebut menandakan bahwa pemkot sangat konsisten dalam pengelolaan keuangan daerah

Heri Mustamin
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak